

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI PAPUA BARAT 2018

Turunnya Kinerja Demokrasi Papua Barat di Tahun 2018...

Setelah menunjukkan perbaikan pada periode 2016 – 2017, kinerja demokrasi pada tahun 2018 di Provinsi Papua Barat kembali memburuk. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Endang Retno Sri Subiyandani pada saat rilis Indeks Demokrasi Indonesia, 5 Agustus 2019 di kantornya, Jl Trikora Sowi IV No. 99 Manokwari.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat tahun 2018 mencapai 58,29 (skala 0-100). Jika dibandingkan dengan IDI tahun 2017, terdapat penurunan indeks sebesar 4,47 poin. Angka ini masih jauh di bawah angka nasional yang mencapai 72,39. Bahkan, capaian IDI Papua Barat pada tahun 2018 merupakan capaian paling rendah diantara seluruh provinsi-provinsi di Indonesia dan merupakan satu-satunya IDI yang masuk dalam kategori buruk.

Endang menjelaskan bahwa angka IDI merupakan refleksi dari situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI, memang dirancang untuk *sensitive* terhadap naik turunnya kondisi demokrasi di suatu wilayah, karena disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*). Angka IDI sendiri dibangun dari 3 aspek utama yang meliputi Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga

Demokrasi. Masing-masing aspek terdiri atas beberapa variabel (total 11 variabel) dan tiap variabel terdiri atas beberapa indikator pembangun IDI (total 28 indikator).

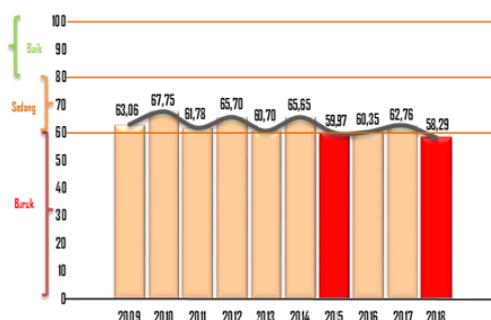
Selanjutnya Endang mengatakan bahwa dari ketiga aspek di atas, hanya aspek hak-hak politik yang menunjukkan sedikit peningkatan sebesar 1,06 poin (dari 39,05 di tahun 2017 menjadi 40,11 pada 2018). Sedangkan aspek kebebasan sipil turun signifikan sebesar 10,31 poin (dari 92,42 menjadi 82,11). Sama halnya dengan aspek lembaga demokrasi yang juga mengalami penurunan sebesar 5,93 poin dari 63,14 pada tahun 2017 menjadi 57,21 pada tahun 2018.

Jika ditinjau menurut variabelnya, dari total 11 variabel, hanya 2 variabel yang mengalami kenaikan indeks, yaitu variabel berkumpul dan berserikat dan variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Sebaliknya, terdapat enam variabel yang mengalami penurunan, yaitu variabel kebebasan berpendapat, variabel kebebasan berkeyakinan, variabel peran DPRD, variabel peran partai politik, dan variabel peran birokrasi pemerintah.

Dari ke-28 indikator penyusun IDI di Papua Barat, masih terdapat 11 indikator memiliki nilai indeks "buruk" (skor < 60), yakni ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, kualitas daftar pemilih tetap/DPT, persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Dari semua indikator pembangun IDI Papua Barat, sebagian besar indikator yang berasal dari aspek lembaga demokrasi masih memiliki kinerja demokrasi yang "buruk". Oleh karena itu, arah dan kebijakan pembangunan politik di Provinsi Papua Barat seharusnya dapat bertolak dari peningkatan kapasitas lembaga demokrasi di provinsi ini.

Grafik 1. Perkembangan IDI Provinsi Papua Barat, 2009-2018



Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Papua Barat, 2009-2018

